



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024

SEKRETARIAT DPRD

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Laporan Keuangan

SEKRETARIAT DPRD

Per 31 Desember 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Sekretariat DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Kab. Lombok Tengah, 20 Januari 2025

Sekretaris DPRD

Kabupaten Lombok Tengah,



SUHADI KANA, S.Sos.MH.

NIP. 197405151997031009

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	viii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	1
II. NERACA.....	5
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	8
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	11
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	14
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	17
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR	
PENCAPAIAN KINERJA APBD.....	19
2.1 Kebijakan Keuangan.....	19
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	19
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	24
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum.....	24
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	25
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	26
4.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	26
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	27
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	27

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD.....	31
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	44
5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	44
5.3 Pos-pos Neraca.....	54
5.4 Pos-pos Laporan Operasional.....	66
5.6 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	74
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	78
6.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan.....	78
6.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	82
BAB VII PENUTUP.....	85
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2024	19
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2024	20
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan APBD Sekretariat DPRD Tahun 2024	21
Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	24
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah.....	44
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	45
Tabel 5.3 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	45
Tabel 5.4 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	48
Tabel 5.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal.....	50
Tabel 5.6 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	51
Tabel 5.7 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	52
Tabel 5.8 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA	53
Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi SiLPA.....	54
Tabel 5.10 Rincian Aset.....	54
Tabel 5.11 Rincian Aset Lancar.....	55
Tabel 5.12 Persediaan	56
Tabel 5.13 Daftar Nilai Aset Tetap.....	57
Tabel 5.14 Daftar Nilai Aset Tetap Tanah.....	57
Tabel 5.15 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2024	58
Tabel 5.16 Aset Tetap Peralatan dan Mesin	58
Tabel 5.17 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024.....	59
Tabel 5.18 Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	59
Tabel 5.19 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	59
Tabel 5.20 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	60
Tabel 5.21 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024.....	60
Tabel 5.22 Aset Tetap Lainnya.....	61
Tabel 5.23 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024.....	61

Tabel 5.24 Daftar Aset Lainnya.....	62
Tabel 5.25 Rincian Kewajiban.....	63
Tabel 5.26 Rincian Kewajiban Jangka Pendek.....	64
Tabel 5.27 Rincian Utang Belanja	65
Tabel 5.28 Rincian Utang Belanja Pegawai.....	65
Tabel 5.29 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa	65
Tabel 5.30 Rincian Beban.....	67
Tabel 5.31 Rincian Beban Operasional.....	67
Tabel 5.32 Rincian Beban Pegawai	68
Tabel 5.33 Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO.....	68
Tabel 5.34 Rincian Beban Barang dan Jasa	69
Tabel 5.35 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO.....	70
Tabel 5.36 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	71
Tabel 5.37 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional....	72
Tabel 5.38 Rincian Surplus/(Defisit) – LO.....	73
Tabel 5.39 Ekuitas Awal - LO	74
Tabel 5.40 Surplus/(Defisit)-LO.....	75
Tabel 5.41 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar	75
Tabel 5.42 Rincian Ekuitas Akhir.....	77
Gambar 6.1 Bagan Struktur Organisasi	
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	78
Tabel 6.2 Register Pegawai.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
Lampiran 2	:	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024
Lampiran 3	:	Berita Acara Opname Persediaan dan Daftar Persediaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 4	:	Berita Acara Penutupan Kas Per 31 Desember 2024
Lampiran 5	:	Kertas Kerja Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024
Lampiran 6	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Kewajiban Per 31 Desember 2024 : a. Daftar Utang Pegawai Per 31 Desember 2024 b. Daftar Utang Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024
Lampiran 7	:	Laporan Keuangan SKPD Rinci sd Level 6 (LRA, LO, Neraca, LPE)
Lampiran 8	:	Kertas Kerja Laporan Operasional

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 20 Januari 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Lombok Tengah,



SUHADI KANA, S.Sos,MH.

NIP. 197405151997031009



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023**



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01	Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0.00	0.00		0.00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0.00	0.00		0.00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0.00	0.00		0.00
4.1.01.09	Pajak Reklame	0.00	0.00		0.00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0.00	0.00		0.00
4.1.01.11	Pajak Parkir	0.00	0.00		0.00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	0.00	0.00		0.00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.00		0.00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.00	0.00		0.00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0.00	0.00		0.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0.00	0.00		0.00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(,PBJT],	0.00	0.00		0.00
4.1.02	Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	0.00	0.00		0.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00		0.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00		0.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0.00	0.00		0.00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	0.00		0.00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	0.00		0.00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0.00	0.00		0.00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0.00	0.00		0.00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0.00	0.00		0.00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0.00	0.00		0.00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0.00	0.00		0.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0.00	0.00		0.00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0.00	0.00		0.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0.00	0.00		0.00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BELANJA DAERAH	55,015,604,589.00	53,039,844,057.00	96.41	51,788,794,811.00
5.1	BELANJA OPERASI	54,151,660,136.00	52,181,476,262.00	96.36	50,768,023,505.00
5.1.01	Belanja Pegawai	29,854,986,751.00	28,706,338,941.00	96.15	28,879,902,821.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,399,817,003.00	3,287,037,484.00	96.68	3,255,565,270.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,474,969,431.00	1,408,985,527.00	95.53	1,434,404,421.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19,908,000.00	19,908,000.00	100.00	12,894,000.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24,648,292,317.00	23,759,407,930.00	96.39	23,925,039,130.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	312,000,000.00	231,000,000.00	74.04	252,000,000.00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24,296,673,385.00	23,475,137,321.00	96.62	21,888,120,684.00
5.1.02.01	Belanja Barang	9,712,989,364.00	9,456,602,986.00	97.36	10,764,826,955.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	6,887,714,921.00	6,649,505,444.00	96.54	6,936,024,077.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	184,226,100.00	179,751,500.00	97.57	101,165,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7,511,743,000.00	7,189,277,391.00	95.71	4,086,104,652.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00		0.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0.00	0.00		0.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0.00	0.00		0.00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0.00	0.00		0.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0.00	0.00		0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	54,151,660,136.00	52,181,476,262.00	96.36	50,768,023,505.00
5.2	BELANJA MODAL	863,944,453.00	858,367,795.00	99.35	1,020,771,306.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331,870,153.00	327,700,795.00	98.74	669,303,306.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	459,120,000.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	98,651,334.00	98,597,000.00	99.94	0.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	143,089,629.00	139,744,605.00	97.66	87,506,306.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	76,137,320.00	75,367,320.00	98.99	122,677,000.00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	13,991,870.00	13,991,870.00	100.00	0.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	532,074,300.00	530,667,000.00	99.74	351,468,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	532,074,300.00	530,667,000.00	99.74	351,468,000.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0.00	0.00		0.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0.00	0.00		0.00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0.00	0.00		0.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0.00	0.00		0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0.00	0.00		0.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0.00	0.00		0.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00		0.00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	0.00		0.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00		0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	863,944,453.00	858,367,795.00	99.35	1,020,771,306.00
	JUMLAH BELANJA	55,015,604,589.00	53,039,844,057.00	96.41	51,788,794,811.00
	SURPLUS/DEFISIT	-55,015,604,589.00	-53,039,844,057.00	-96.41	-51,788,794,811.00
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Se	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian	0.00	0.00		0.00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0.00	0.00		0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-55,015,604,589.00	-53,039,844,057.00	-96.41	-51,788,794,811.00

Kab. Lombok Tengah, 20 Januari 2025

Sekretaris DPRD

Kabupaten Lombok Tengah



SUHADI KANA, S.Sos, MH
NIP. 197405151997031009



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

SEKRETARIAT DPRD

NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DPRD
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET	5.3.1	8,875,047,438.00	8,896,563,083.14
ASET LANCAR	5.3.1.1	1,084,822.00	1,791,349.00
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	-	-
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	-	-
Kas di Bendahara BOSP	5.3.1.1.1.5	-	-
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	5.3.1.1.1.6	-	-
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	-	-
Piutang	5.3.1.1.2	-	-
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	-	-
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.3.1.1.2.3	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.5	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.2.6	-	-
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.7	-	-
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	-	-
Penyisihan piutang Pendapatan	5.3.1.1.3.1	-	-
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.3.2	-	-
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	-	-
Persediaan	5.3.1.1.5	1,084,822.00	1,791,349.00
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	-	-
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	-	-
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	-	-
Penyisihan dana bergulir	5.3.1.2.1.2	-	-
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	-	-
ASET TETAP	5.3.1.3	8,803,961,850.00	8,824,770,968.14
Tanah	5.3.1.3.1	3,899,850,000.00	3,899,850,000.00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	9,200,382,480.44	8,714,846,685.44
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	3,862,769,956.00	3,489,937,956.00

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	410,513,000.00	410,513,000.00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	120,907,608.00	120,907,608.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	-	-
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(8,690,461,194.44)	(7,811,284,281.30)
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4	-	-
Properti Investasi Tanah	5.3.1.4.1	-	-
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.4.2	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.3	-	-
ASET LAINNYA	5.3.1.5	70,000,766.00	70,000,766.00
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	-	-
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	-	-
Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	70,000,766.00	70,000,766.00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.5	-	-
KEWAJIBAN	5.3.2	134,410,553.00	106,671,883.00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	134,410,553.00	106,671,883.00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	-	-
Utang Bunga	5.3.2.1.2	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	-	-
Utang Belanja dan transfer	5.3.2.1.5	134,410,553.00	106,671,883.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.1	-	-
EKUITAS	5.3.3	8,740,636,885.00	8,789,891,200.14
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8,875,047,438.00	8,896,563,083.14

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kab. Lombok Tengah, 20 Januari 2025

Sekretaris DPRD

Kabupaten Lombok Tengah



SUHADI KANA, S.Sos, MH

NIP. 197405151997031009



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

SEKRETARIAT DPRD

LAPORAN OPERASIONAL

Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
PENDAPATAN DAERAH - LO	5.4.1	-	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1	-	-	-	-
Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	-	-	-	-
Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	-	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	-	-	-	-
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA	5.4.1.2.1	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.1.1	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum - LO	5.4.1.2.1.2	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus-Fisik - LO	5.4.1.2.1.3	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus- Non Fisik - LO	5.4.1.2.1.4	-	-	-	-
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO	5.4.1.2.2	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah (DID) - LO	5.4.1.2.2.1	-	-	-	-
Dana Desa - LO	5.4.1.2.2.2	-	-	-	-
TRANSFER ANTAR DAERAH - LO	5.4.1.2.3	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.3.1	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.3.2	-	-	-	-
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3	-	-	-	-
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	-	-	-	-
Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	5.4.1.3.2	-	-	-	-
BEBAN DAERAH	5.4.2	53,089,098,372.14	51,664,435,930.85	1,424,662,441.29	2.76
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	53,089,098,372.14	51,664,435,930.85	1,424,662,441.29	2.76
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	28,698,808,611.00	28,866,448,057.00	(167,639,446.00)	(0.58)
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	23,511,112,848.00	21,887,414,035.00	1,623,698,813.00	7.42
Beban Bunga	5.4.2.2	-	-	-	-
Beban Subsidi	5.4.2.3	-	-	-	-
Beban Hibah	5.4.2.4	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.6	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.7	879,176,913.14	910,573,838.85	(31,396,925.71)	(3.45)
BEBAN TRANSFER	5.4.2.8	-	-	-	-
Beban Bagi Hasil	5.4.2.8.1	-	-	-	-
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.8.2	-	-	-	-
BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.9	-	-	-	-
Beban tak terduga	5.4.2.9.1	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	(53,089,098,372.14)	(51,664,435,930.85)	(1,424,662,441.29)	2.76
KEGIATAN NON OPEASIONAL	5.4.4				

SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.4.1	-	-	-	-
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.1		-		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.1	-		-	-
DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.2	-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.2		-		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.2	-		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON -		-	-	-	-
POS LUAR BIASA	5.4.5				
Pendapatan Luar Biasa	5.4.5				
Beban Luar Biasa	5.4.5	-		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	5.4.6	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.7	(53,089,098,372.14)	(51,664,435,930.85)	(1,424,662,441.29)	2.76

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kab. Lombok Tengah, 20 Januari 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Lombok Tengah



SUHADI KANA, S.Sos, MH
NIP. 197405151997031009



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	REF KALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	8,789,891,200.14	8,665,532,319.99
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.6.2	- 53,089,098,372.14	- 51,664,435,930.85
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	-	-
	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	5.6.3.1	-	-
	Koreksi Ekuitas - Investasi	5.6.3.2	-	-
	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.3	-	-
	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3.4	-	-
	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	5.6.3.5	-	-
4	RK PPKD	5.6.3	53,039,844,057.00	51,788,794,811.00
4	EKUITAS AKHIR	5.6.4	8,740,636,885.00	8,789,891,200.14

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kab. Lombok Tengah, 20 Januari 2025
Sekretaris DPRD
Kabupaten Lombok Tengah


SUHADI KANA, S.Sos, MH
NIP. 197405151997031009



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

SEKRETARIAT DPRD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023

BAB I PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No.

17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan*: Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.

- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangun dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 4.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
I	Pendapatan	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
II	Belanja				
1	Belanja Pegawai	30.842.742.543,00	29.854.986.751,00	(Rp987.755.792,00)	(3.31)
2	Belanja Barang dan Jasa	18.948.096.449,00	24.296.673.385,00	5.348.576.936,00	22.01
3	Belanja Modal	816.986.039,00	863.944.453,00	46.958.414,00	5.44
	Jumlah Belanja	50.607.825.031,00	55.015.604.589,00	4,407,779,558.00	8.71
	Defisit/Surplus				

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan

kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan Program ini menunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 36.176.541.454,00 terealisasi senilai Rp 34,818,288,899.00 atau 96.25%
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Tujuan Program ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 6 (enam) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 18,839,063,135.00 terealisasi senilai Rp 18,221,555,158.00 atau 96.71%

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Pendapatan	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
II	Belanja				
1	Belanja Operasi	49.790.838.992,00	54,151,660,136.00	52,178,476,262.00	96.36
1.1	Belanja Pegawai	30.842.742.543,00	29.854.986.751,00	28,706,338,941.00	96.15
1.2	Belanja Barang	18.948.096.449,00	24.296.673.385,00	23,475,137,321.00	96.68
2	Belanja Modal	816.986.039,00	863,944,453.00	858,367,795.00	99.35
2.2	Belanja Modal Peralatan Mesin	284.911.739,00	331.870.153,00	327,700,795.00	98.74
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	532.074.300,00	532.074.300,00	530,667,000.00	99.74
	Jumlah Belanja	50.607.825.031,00	55.015.604.589,00	53,039,844,057.00	96.41

Realisasi Belanja Rp 53,039,844,057.00 **lebih rendah** dari anggarannya senilai Rp 55.015.604.589,00 atau 96.41%, disebabkan karena adanya belanja - belanja yang tidak terealisasi di tahun 2024.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	100
1	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Outcome : Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	79.956.198,00 22 Dokumen	78.961.000,00 22 Dokumen	98.76 100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input : dana Output : Outcome : Laporan Administrasi Keuangan	4.966.728.842,00 19 Dokumen	4.787.556.307,00 19 Dokumen	96.36 100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : dana Output : Outcome : Laporan Administrasi Umum OPD	1.587.165.762,00 12 Laporan	1.531.898.155,00 12 Laporan	96.52 100
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : dana Output : Outcome : Layanan umum kantor	1.953.806.808,00 12 Bulan	1.910.579.828,00 12 Bulan	97.79 100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Input : dana Output : Outcome : Barang milik daerah terpelihara	1.097.727.128,00 67 Unit	1.026.868.770,00 67 Unit	93.54 100

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Pemerintahan Daerah				
6	Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	Input : dana Output : Outcome : Laporan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	25.916.511.557,00	24.911.117.930,00	96.12
			12 Laporan	12 Laporan	100
7	Layanan Administrasi DPRD	Input : dana Output : Outcome : Laporan layanan administrasi DPRD	574.645.159,00	571.306.909,00	99.42
			125 Dokumen	125 Dokumen	100
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas	70	100	142.86
		Pembahasan LKPJ Tepat Waktu	Kesesuaian Aturan	Kesesuaian Aturan	100
		Penetapan persetujuan APBD Tepat waktu	Kesesuaian Aturan	Kesesuaian Aturan	100
		Berita yang dipublikasikan	760 Berita	760 Berita	100
1	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Input : dana Output : Outcome : Rancangan Peraturan daerah & Peraturan DPRD yang dibahas	3.687.003.764,00	3.487.083.698,00	94.58
			8 Ranperda & Peraturan DPRD	22 Ranperda & Peraturan DPRD	275
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Input : dana Output : Outcome : Dokumen Kebijakan Anggaran	672.772.444,00	547.378.900,00	81.36
			5 Dokumen	5 Dokumen	100
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Input : dana Output : Outcome : Dokumen Hasil Pengawasan DPRD	176.089.145,00	143.479.100,00	81.48
			6 Dokumen	6 Dokumen	100
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Input : dana Output : Outcome : Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas	5.507.209.152,00	5.336.801.575,00	96.85
			20 Dokumen	20 Dokumen	100
5		Input : dana	6.070.602.827,00	6.009.715.690,00	99,00

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Output :			
		Outcome : Dokumen Aspirasi Masyarakat	43 Dokumen	43 Dokumen	100
6	Fasilitasi Tugas DPRD	Input : dana	2.725.385.803,00	2.697.096.195,00	98.96
		Output :			
		Outcome : Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	29 Dokumen	29 Dokumen	100

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 202n	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6=(4/3)*100	7=(4-5)/4*100
A	PENDAPATAN	-	-	-	-	-
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-	-
B	BELANJA					
1	Belanja Pegawai	29,854,986,751.00	28,706,338,941.00	28,879,902,821.00	96.15	-0.60
2	Belanja Barang & Jasa	24,296,673,385.00	23,475,137,321.00	21,888,120,684.00	96.61	6.75
3	Belanja Modal	863,944,453.00	858,367,795.00	1,020,771,306.00	99.35	-18.92
	Jumlah Belanja	55,015,604,589.00	53,039,844,057.00	51,788,794,811.00	96.41	2.35

Pada bagian pendapatan terjadi **pelampauan/penurunan** senilai Rp.....,00 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp.....,00 terealisasi senilai Rp.....,00 atau.....%

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai Rp 53,036,844,057.00 yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp 55,015,604,589.00 terealisasi Rp 53,039,844,057.00 atau 96.41%.

Capaian bagian belanja senilai 96.40% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp 29,854,986,751.00 terealisasi senilai Rp 28,706,338,941.00 atau 96.15%
- b. Belanja Barang Jasa, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp24,296,673,385.00 terealisasi senilai Rp 23,475,137,321.00 atau 96.61%

Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi senilai 2.35%, yaitu Rp 51,788,794,811.00 Pada tahun 2023 menjadi Rp 53,036,844,057.00 Pada tahun 2024.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

- a. Kendala terkait dengan efisiensi belanja Medical Check Up
 - a. Hal tersebut disebabkan karena jadwal kegiatan yang sangat padat, DPRD tidak dapat memanfaatkan fasilitasi medical check up.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:

- a. Menjadwalkan lebih dini pelaksanaan medical check up

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untukmelakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);

Berarti bahwa Laporrnan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini

diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis Akrua (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrua untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrua untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam

Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan asset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Asset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar asset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan asset tetap dilakukan jika asset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan asset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai asset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga

harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.

- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila

pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);

- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi

yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih

dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

1.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

I.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

I.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk

memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

I.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data

tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

I.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II.Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potong PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potong PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

C. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 sebesar Rp. 0.00

5.1.2. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp 53,039,844,057.00 mencapai 96.40% dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp 55.015.604.589,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	54,151,660,136.00	52,181,476,262.00	96.36	50,768,023,505.00
2.	Belanja Modal	863,944,453.00	858,367,795.00	99.35	1,020,771,306.00
3.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		55.015.604.589,00	53,039,844,057.00	96.41	51,788,794,811.00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp 52,181,476,262.00 atau mencapai 96.36% dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp 54,151,660,136.00. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	29,854,986,751.00	28,706,338,941.00	96.15	28,879,902,821.00
2	Belanja Barang Jasa	24,296,673,385.00	23,475,137,321.00	96.62	21,888,120,684.00
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		54,151,660,136.00	52,181,476,262.00	96.36	50,768,023,505.00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp 28,706,338,941.00 atau mencapai 96.15% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp29,854,986,751.00. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai				
	a. Gaji dan Tunjangan	3,399,817,003.00	3,287,037,484.00	96.68	3,255,565,270.00
	1 Belanja Gaji Pokok ASN	2,564,075,885.00	2,492,240,490.00	97.20	2,547,492,802.00
	Belanja Gaji Pokok PNS	2,564,075,885.00	2,492,240,490.00	97.20	2,547,492,802.00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN	266,123,441.00	259,778,624.00	97.62	266,849,991.00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	266,123,441.00	259,778,624.00	97.62	266,849,991.00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK				
	3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	124,023,296.00	115,110,000.00	92.81	167,850,000.00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	124,023,296.00	115,110,000.00	92.81	167,850,000.00
	4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	197,373,038.00	183,658,000.00	93.05	0.00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	197,373,038.00	183,658,000.00	93.05	0.00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	89,715,072.00	86,105,000.00	95.98	100,835,000.00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	89,715,072.00	86,105,000.00	95.98	100,835,000.00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK				
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	151,659,772.00	145,998,720.00	96.27	167,579,880.00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	151,659,772.00	145,998,720.00	96.27	167,579,880.00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6,709,568.00	4,110,155.00	61.26	4,918,954.00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6,709,568.00	4,110,155.00	61.26	4,918,954.00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	136,931.00	36,495.00	26.65	38,643.00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	136,931.00	36,495.00	26.65	38,643.00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	151,659,772.00	145,998,720.00	96.27	167,579,880.00
b.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,474,969,431.00	1,408,985,527.00	95.53	1,434,404,421.00
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,474,969,431.00	1,408,985,527.00	95.53	1,434,404,421.00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Honorarium	19,908,000.00	19,908,000.00	100.00	12,894,000.00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19,908,000.00	19,908,000.00	100.00	12,894,000.00
d.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24,648,292,317.00	23,759,407,930.00	96.39	23,925,039,130.00
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1,233,289,721.00	1,112,580,000.00	90.21	1,114,260,000.00
	Belanja Uang Representasi DPRD	1,233,289,721.00	1,112,580,000.00	90.21	1,114,260,000.00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	146,323,510.00	119,443,800.00	81.63	119,025,900.00
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	146,323,510.00	119,443,800.00	81.63	119,025,900.00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	174,915,440.00	140,494,800.00	80.32	140,567,220.00
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	174,915,440.00	140,494,800.00	80.32	140,567,220.00
4	Belanja Uang Paket DPRD	105,508,000.00	95,340,000.00	90.36	95,508,000.00
	Belanja Uang Paket DPRD	105,508,000.00	95,340,000.00	90.36	95,508,000.00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,623,297,116.00	1,613,241,000.00	99.38	1,615,677,000.00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,623,297,116.00	1,613,241,000.00	99.38	1,615,677,000.00
	6 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	153,967,600.00	120,155,700.00	78.04	145,063,800.00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	153,967,600.00	120,155,700.00	78.04	145,063,800.00
	7 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	100.00	6,300,000,000.00
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	100.00	6,300,000,000.00
	8 Belanja Tunjangan Reses DPRD	1,050,000,000.00	1,039,500,000.00	99.00	1,575,000,000.00
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1,050,000,000.00	1,039,500,000.00	99.00	1,575,000,000.00
	9 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	262,311,266.00	227,728,004.00	86.82	229,309,295.00
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	262,311,266.00	227,728,004.00	86.82	229,309,295.00
	10 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6,166,679,664.00	5,635,534,626.00	91.39	5,652,002,915.00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	129,436,692.00	24,381,986.00	18.84	24,434,135.00
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4,292,192.00	2,288,160.00	53.31	2,292,198.00
	Belanja Jaminan Kematian DPRD	9,876,576.00	6,864,480.00	69.50	6,876,582
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6,023,074,204.00	5,602,000,000.00	93.01	5,618,400,000
	11 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6,955,000,000.00	6,912,500,000.00	99.39	6,915,000,000.00
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6,955,000,000.00	6,912,500,000.00	99.39	6,915,000,000.00
	12 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477,000,000.00	442,890,000.00	92.85	23,625,000.00
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477,000,000.00	442,890,000.00	92.85	23,625,000.00
e.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	312,000,000.00	231,000,000.00	74.04	252,000,000.00
	1 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312,000,000.00	231,000,000.00	74.04	252,000,000.00
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312,000,000.00	231,000,000.00	74.04	252,000,000.00
	Jumlah	29,854,986,751.00	28,706,338,941.00	96.15	28,879,902,821.00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Gaji dan Tunjangan ASN dengan Anggaran tahun 2024 Rp 3,399,817,003.00 terealisasi Rp 3,287,037,484.00 dibandingkan dengan tahun 2023 Rp3,255,565,270.00 mengalami kenaikan sebesar Rp 31,472,214.00.
- 2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1,434,404,421.00 dibandingkan di tahun 2024 sebesar Rp1,408,985,527.00 mengalami penurunan realisasi sebesar Rp 25,418,894.00.
- 3) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan TA 2024 direalisasikan sebesar Rp 19,908,000.00 dari anggaran sebesar Rp 19,908,000.00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 12,894,000.00 mengalami kenaikan sebesar Rp 7,014,000.00.
- 4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp23,759,407,930.00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 23,925,039,130.00 mengalami penurunan sebesar Rp 165,631,200.00
- 5) Untuk Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 231,000,000.00 dibandingkan di tahun 2023 sebesar Rp252,000,000.00 terjadi penurunan realisasi sebesar Rp 21.000.000,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp 23,475,137,321.00 atau mencapai 96.62% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp24,296,673,385.00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang Jasa				
1	Belanja Barang	9,712,989,364.00	9,456,602,986.00	97.36	10,764,826,955.00
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	9,712,989,364.00	9,456,602,986.00	97.36	10,764,826,955.00
	b. Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Jasa	6,887,714,921.00	6,649,505,444.00	96.54	6,936,024,077.00
	a. Belanja Jasa Kantor	5,157,450,268.00	5,014,307,744.00	97.22	4,685,766,577.00
	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2,880,000.00	2,820,000.00	97.92	2,808,000.00

No.	Uraian		2024			2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	c.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	72,852,253.00	32,140,000.00	44.12	7,497,500.00
	d.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	814,904,400.00	791,321,700.00	97.11	729,952,000.00
	e.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	839,628,000.00	808,916,000.00	96.34	1,510,000,000.00
3	Belanja Pemeliharaan		184,226,100.00	179,751,500.00	97.57	101,165,000.00
	a.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	184,226,100.00	179,751,500.00	97.57	101,165,000.00
4	Belanja Perjalanan Dinas		7,511,743,000.00	7,189,277,391.00	95.71	4,086,104,652.00
	a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7,511,743,000.00	7,189,277,391.00	95.71	4,086,104,652.00
Jumlah			24,296,673,385.00	23,475,137,321.00	96.62	21,888,120,684.00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Belanja Barang Habis Pakai dengan Anggaran tahun 2024 Rp 9,712,989,364.00 terealisasi Rp 9,456,602,986.00 dibandingkan dengan tahun 2023 Rp10,764,826,955.00 mengalami penurunan sebesar Rp 1,308,223,969.00.
- 2) Belanja Jasa di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 6,936,024,077.00 dibandingkan di tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp 6,887,714,921.00 yang direalisasikan sebesar Rp 6,649,505,444.00 mengalami penurunan realisasi sebesar Rp 286,518,633.00.
- 3) Belanja Pemeliharaan TA 2024 direalisasikan sebesar Rp 179,751,500.00 dari anggaran sebesar Rp 184,226,100.00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 101,165,000.00 mengalami kenaikan sebesar Rp 78,586,500.00.
- 4) Belanja Perjalanan Dinas pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7,189,277,391.00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4,086,104,652.00 mengalami kenaikan sebesar Rp 3,103,172,739.00

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Bunga TA 2024 sebesar Rp0,00

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp0,00.

Uraikan dalam bentuk tabel

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp858,367,795.00 atau mencapai 99.35% dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp863,944,453.00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	331,870,153.00	327,700,795.00	98.74	669,303,306.00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	532,074,300.00	530,667,000.00	99.74	351,468,000.00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		863,944,453.00	858,367,795.00	99.35	1,020,771,306.00

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar Rp327,700,795.00 atau mencapai 98.74% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp331,870,153.00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Peralatan dan Mesin				
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	98,651,334.00	98,597,000.00	99.94	0.00
	Belanja Modal Alat Kantor	40,535,906.00	40,535,000.00	100.00	0.00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40,535,906.00	40,535,000.00	100.00	0.00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	58,115,428.00	58,062,000.00	99.91	0.00
	Belanja Modal Mebel	25,406,628.00	25,380,000.00	99.90	0.00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28,208,800.00	28,182,000.00	99.90	0.00
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	0.00
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	143,089,629.00	139,744,605.00	97.66	87,506,306.00
	Belanja Modal Alat Studio	143,089,629.00	139,744,605.00	97.66	87,506,306.00
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	64,249,629.00	61,069,605.00	95.05	49,006,306.00
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	35,840,000.00	35,750,000.00	99.75	38,500,000.00
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	43,000,000.00	42,925,000.00	99.83	0.00
3	Belanja Modal Komputer	76,137,320.00	75,367,320.00	98.99	122,677,000.00
	Belanja Modal Komputer Unit	59,406,000.00	58,750,000.00	98.90	108,090,000.00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	59,406,000.00	58,750,000.00	98.90	108,090,000.00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	16,731,320.00	16,617,320.00	99.32	14,587,000.00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	16,731,320.00	16,617,320.00	99.32	14,587,000.00
4	Belanja Modal Alat Eksplorasi	13,991,870.00	13,991,870.00	100.00	0.00
	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	13,991,870.00	13,991,870.00	100.00	0.00
	Belanja Modal Elektronik/Electric	13,991,870.00	13,991,870.00	100.00	0.00
	J u m l a h	331,870,153.00	327,700,795.00	98.74	669,303,306.00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Peralatan

dan Mesin Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp98,651,334.00 terealisasi sebesar Rp98,597,000.00 dibandingkan tahun 2023 belum adanya realisasi untuk belanja modal tersebut.
- 2) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp139,744,605.00 dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp143,089,629.00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp87,506,306.00 mengalami kenaikan sebesar Rp 52,238,299.00.
- 3) Belanja Modal Komputer tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 76,137,320.00 dan terealisasi tahun 2024 sebesar Rp 75,367,320.00 sedangkan tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp 122,677,000.00. hal ini menunjukkan terjadinya penurunan belanja sebesar Rp 47,309,680.00.
- 4) Belanja Modal Alat Eksplorasi TA 2024 direalisasikan sebesar Rp13,991,870.00 dari anggaran sebesar Rp 13,991,870.00.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 terealisasi sebesar Rp530,667,000.00 atau mencapai 99.74% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp532,074,300.00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	20XX			20XX
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Gedung dan Bangunan				
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	532,074,300.00	530,667,000.00	99.74	351,468,000.00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	532,074,300.00	530,667,000.00	99.74	351,468,000.00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	373,506,000.00	372,832,000.00	99.82	149,378,000.00
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	158,568,300.00	157,835,000.00	99.54	202,090,000.00
	J u m l a h	532,074,300.00	530,667,000.00	99.74	351,468,000.00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Belanja

Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp532,074,300.00 dan terealisasi sebesar Rp530,667,000.00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp351,468,000.00 mengalami kenaikan sebesar Rp179,199,000.00.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp0,00, Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp53,039,844,057.00, sehingga terjadi Surplus realisasi APBD sebesar Rp 53,039,844,057.00 atau (96.41)% dari anggaran sebesar (Rp55,015,604,589.00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	55,015,604,589.00	53,039,844,057.00	96.41	51,788,794,811.00
	Surplus/ (Defisit)	(55,015,604,589.00)	(53,039,844,057.00)	(96.41)	(51,788,794,811.00)

5.1.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran atau jumlah Surplus/(Defisit) ditambah dengan jumlah Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9. Anggaran dan Realisasi SiLPA

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Surplus/(Defisit)	(55,015,604,589.00)	(53,039,844,057.00)	(96.41)	(51,788,794,811.00)
2	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
SiLPA		(55,015,604,589.00)	(53,039,844,057.00)	(96.41)	(51,788,794,811.00)

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan OPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 8,875,047,438.00 dan Rp 8,896,563,083.14. Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.10. Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Aset Lancar	1,084,822.00	1,791,349.00
2	Investasi Jangka Panjang	-	-
3	Aset Tetap	8,803,961,850.00	8,824,770,968.14
4	Properti Investasi	-	-
5	Aset Lainnya	70,000,766.00	70,000,766.00
	Jumlah	8,875,047,438.00	8,896,563,083.14

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1,084,822.00 dan Rp 1,791,349.00. Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.11. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas dan setara Kas	-	-
2	Piutang	-	-
3	Penyisihan Piutang	-	-
4	Beban dibayar dimuka	-	-
5	Persediaan	1,084,822.00	1,791,349.00
	Jumlah	1,084,822.00	1,791,349.00

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya dicatat sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0.00 dan Rp0.00

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah namun sampai akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0.00 dan Rp0.00.

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Tarif penyisihan piutang dilakukan dengan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

5.3.1.1.4 Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah aset lancar yang timbul karena terdapat perikatan antara pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang

terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode belum seluruhnya diserahkan.

Saldo Beban dibayar dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0.00 dan Rp0.00

5.3.1.1.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1,084,822.00 dan Rp1,791,349.00. Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya.

Tabel 5.12 Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	445,465.00	997,485.00
2	Perabot Kantor	214,730.00	264,210.00
3	Alat Listrik	424,627.00	529,654.00
	Jumlah	1,084,822.00	1,791,349.00

5.3.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 8,805,961,850.00 dan Rp 8,824,770,968.14. Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.13. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	3,899,850,000.00	3,899,850,000.00
2	Peralatan dan Mesin	9,200,382,480.44	8,714,846,685.44
3	Gedung dan Bangunan	3,862,769,956.00	3,489,937,956.00
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	410,513,000.00	410,513,000.00
5	Aset Tetap Lainnya	120,907,608.00	120,907,608.00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	17,494,423,044.44	16,636,055,249.44
7	Akumulasi Penyusutan	(8,690,461,194.44)	(7,811,284,281.30)
	Jumlah Bersih	8,805,961,850.00	8,824,770,968.14

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

5.3.1.2.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp3,899,850,000.00 dan Rp 3,899,850,000.00 Rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebagai mana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.14. Daftar Nilai Aset Tetap Tanah

Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.1	Tanah	3,899,850,000.00	3,899,850,000.00
1.3.1.01	Tanah	3,899,850,000.00	3,899,850,000.00
1.3.1.01.01	Tanah Persil	3,899,850,000.00	3,899,850,000.00
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	1.022.350.000,00	1.022.350.000,00
1.3.1.01.01.04	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.877.500.000,00	2.877.500.000,00

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.15. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	3,899,850,000.00
II	Penambahan	0.00
	1 Belanja Modal TA 2024	0.00
	2 Mutasi Aset Tetap Tanah Antar OPD	0.00
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	0.00
	1 Hibah Aset Tetap Tanah	0.00
	2 Mutasi Aset Tetap Tanah Antar OPD	0.00
	Jumlah Mutasi Kurang	0.00
IV	Saldo Akhir	3,899,850,000.00

5.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp9,200,382,480.44 dan Rp8.714.846.685,44 Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.16. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	9,200,382,480.44	8.714.846.685,44
1.3.2.01	Alat Besar	4.910.000,00	4.910.000,00
1.3.2.02	Alat Angkutan	3.135.221.050,68	3.135.221.050,68
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	22.183.750,00	22.183.750,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	15.120.000,00	15.120.000,00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.194.336.090,00	3.917.424.089,72
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	597.483.376,45	468.726.901,45
1.3.2.08	Alat Laboratorium	131.907.036,00	131.907.036,00
1.3.2.10	Komputer	1.041.971.177,59	966.603.857,59
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	45.000.000,00	45.000.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	7.750.000,00	7.750.000,00

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp 485,535,795.00 dan pengurangan senilai Rp0.00 di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.17. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	8.714.846.685,44
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	327,700,795.00
2	Mutasi antar OPD	157,835,000.00
3	Reklasifikasi Antar KIB	
4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	
6	Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	
7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Tambah	485,535,795.00
III	Pengurangan	
1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	
2	Ekstracomtabel	
3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	
4	Reklas ke KIB Lainnya	
5	Mutasi antar OPD	
6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Kurang	0.00
IV	Saldo Akhir	9,200,382,480.44

5.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp3,862,769,956.00 dan Rp3.489.937.956,00. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel : 5.18. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	3,862,769,956.00	3.489.937.956,00
1.3.3.01	Bangunan Gedung	3,862,769,956.00	3.489.937.956,00

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.19. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	3.489.937.956,00

No	Uraian	Nilai (RP)
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	530,667,000.00
2	Nilai Taksiran	
3	Aset yang di peroleh dari Hibah	
4	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa	
5	Reklasifikasi Dari KIB Lainnya	
6	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
7	Belanja Modal Melalui BTT	
8	Mutasi antar OPD	
9	Reklas Dari DED/aset lainnya	
	Jumlah Mutasi Tambah	530,667,000.00
III	Pengurangan	
1	Aset Tetap yang sudah diakui Tahun sebelumnya melalui Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
2	Mutasi antar OPD	
3	Dihibahkan ke masyarakat/Instansi Lainnya	
4	Reklasifikasi ke KIB Lainnya	157,835,000.00
5	Extracompatible	
6	Tidak memenuhi kreterian aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	
7	Reklas Ke Aset Lainnya/RB	
8	Reklas ke Aset Lainnya karna Kurang Volume	
9	Reklas ke Persediaan	
	Jumlah Mutasi Kurang	157,835,000.00
IV	Saldo Akhir	3,862,769,956.00

5.3.1.3.4 . Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp410.513.000,00 dan Rp410.513.000,00. Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.20 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	410.513.000,00	410.513.000,00
1.3.4.03	Instalasi	152.874.000,00	152.874.000,00
1.3.4.04	Jaringan	257.639.000,00	257.639.000,00

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagaimana rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5.21 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
----	--------	------------

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	410.513.000,00
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	
2	Penyesuaian/ Reklas antar KIB	
3	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
4	Penerimaan Hibah	
5	Mutasi antar OPD	
6	Nilai Taksiran	
	Jumlah Mutasi Tambah	0.00
III	Pengurangan	
1	Mutasi antar OPD	
2	Reklas ke KDP	
3	Kurang Volume Pekerjaan	
	Jumlah Mutasi Kurang	0.00
IV	Saldo Akhir	410.513.000,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp120.907.608,00 dan Rp120.907.608,00 Rincian aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.22 Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Lainnya	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	120.907.608,00	120.907.608,00
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	92.617.608,00	92.617.608,00
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	28.220.000,00	28.220.000,00

Faktor Penyebab Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap lainnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.23 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	120.907.608,00
II	Penambahan	
1	Belanja Modal	
2	Mutasi antar OPD	
3	Reklas Antar KIB	
4	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Tambah	0.00
III	Pengurangan	
1	Tidak memenuhi kriteria aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	
2	Reklas Antar KIB	

	3	Ektracomtebel	
	4	Mutasi antar OPD	
		Jumlah Mutasi Kurang	0.00
IV		Saldo Akhir	120.907.608,00

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0.00 dan Rp0.00

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 8,690,461,194.44 dan Rp 7,811,284,281.30

5.3.1.4 Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk: digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Netto Aset Tetap Properti Investasi Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0.00 dan Rp0.00.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp70,000,766.00 dan Rp 70,000,766.00. Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 Rincian Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24. Daftar Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
2	Kemitraan dengan Pihak III		
	Akumulasi Penyusutan		

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Kemitraan dg Pihak III Netto		
3	Aset Tak Berwujud		
4	Aset Lain-lain :		
	Aset Rusak Berat/Usang	155,016.00	155,016.00
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	69,845,750.00	69,845,750.00
	Jumlah	70,000,766.00	70,000,766.00

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp134,410,553.00 dan Rp106,671,883.00. Rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.25. Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	134,410,553.00	106,671,883.00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
	Jumlah	134,410,553.00	106,671,883.00

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp134,410,553.00 dan Rp106,671,883.00. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.26. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
2	Utang Bunga	0.00	0.00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
5	Utang Belanja	134,410,553.00	106,671,883.00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00
7	Utang Transfer	0.00	0.00
	Jumlah	134,410,553.00	106,671,883.00

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah Utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), IWP, Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

5.3.2.1.2 Utang Bunga (SKPKD)

Utang Bunga Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0.00

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (SKPKD)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah Utang yang timbul karena Pemerintah Daerah menerima penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa dari pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0.00 dan Rp0.00.

5.3.2.1.5 Utang Belanja dan Transfer

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp134,410,553.00 dan Rp 106,671,883.00. Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.27. Rincian Utang Belanja

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	99,091,673.00	106,622,003.00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	35,318,880.00	49,880.00
3	Utang Belanja Perjalanan Dinas	0.00	0.00
3	Utang Belanja Modal	0.00	0.00
4	Utang Belanja Bansos	0.00	0.00
5	Utang Belanja Transfer	0.00	0.00
	Total	134,410,553.00	106,671,883.00

5.3.2.1.5.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp99,091,673.00 dan Rp 106,622,003.00. Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.28. Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan	1,029,658.00	0.00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	98,062,015.00	106,622,003.00
3	Utang Belanja TPG PNSD	0.00	0.00
4	Utang Belanja Tamsil Guru PNSD	0.00	0.00
5	Utang Jasa Pelayanan/Pegawai BLUD	0.00	0.00
6	Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0.00	0.00
	Total	99,091,673.00	106,622,003.00

5.3.2.1.5.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp35,318,880.00 dan Rp 49,880.00 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	49,880.00	49,880.00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	35,269,000.00	

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Total	35,318,880.00	49,880.00

5.3.2.1.5.3. Utang Belanja Modal

Utang belanja modal Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0.00 dan Rp0.00.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0.00 dan Rp0.00

5.3.3 EKUITAS

Nilai Ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp8,740,636,885.00 dan Rp 8,789,891,200.14. Nilai ekuitas menurun senilai Rp(49,254,315.14) atau sebesar (0.56)% di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 8,789,891,200.14

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Sekretariat DPRD untuk kegiatan penyelenggaraan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan senilai Rp0,00.

5.4.2 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 53,089,098,372.14 dan Rp 51,664,435,930.85.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Sekretariat DPRD selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.30. Rincian Beban

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Operasional	53,089,098,372.14	51,664,435,930.85
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
Jumlah		53,089,098,372.14	51,664,435,930.85

5.4.2.1 OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 53,089,098,372.14 dan Rp 51,664,435,930.85. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Sekretariat DPRD selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.31. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Pegawai	28,698,808,611.00	28,866,448,057.00
2	Beban Barang dan Jasa	23,511,112,848.00	21,887,414,035.00
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Hibah	0,00	0,00
5	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	879,176,913.14	910,573,838.85
Jumlah		53,089,098,372.14	51,664,435,930.85

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp 28,698,808,611.00 dan Rp 28,866,448,057.00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama

melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.32. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3,288,067,142.00	3.255.565.270,00
a.	Beban Gaji Pokok ASN	2,493,182,690.00	2.547.492.802,00
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	259,865,792.00	266.849.991,00
c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	115,110,000.00	167.850.000,00
d.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	183,658,000.00	0.00
e.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	86,105,000.00	100.835.000,00
f.	Beban Tunjangan Beras ASN	145,998,720.00	167.579.880,00
g.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,110,155.00	4.918.954,00
h.	Beban Pembulatan Gaji ASN	36,785.00	38.643,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1,400,425,539.00	1.420.949.657,00
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,400,425,539.00	1.420.949.657,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19,908,000.00	12.894.000,00
a.	Beban Honorarium	19,908,000.00	12.894.000,00
Jumlah		28,698,808,611.00	28,866,448,057.00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya Pegawai yang pensiun per 31 Desember 2023
 - Adanya Mutasi pegawai di tahun 2024
 - Adanya pembayaran Tunjangan untuk jabatan Fungsional di tahun 2024
- Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp7,530,330.00 (Rp28,706,338,941.00 - Rp28,698,808,611.00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.33. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	7,530,330.00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkenaan (N)	
Utang Gaji dan Tunjangan	1,029,658.00

Uraian	Nilai
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan	0,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS	98,062,015.00
Utang Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru	0,00
Reklasifikasi Atas Pembayaran Utang Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan) Ke Utang Belanja Pegawai Jasa Pelayanan	0,00
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Gaji dan Tunjangan	0.00
Utang Tambahan Penghasilan PNS/Sertifikasi Guru	106,622,003.00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan BLUD dan Jasa pelayanan Kesehatan Bagi ASN	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	7,530,330.00

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai Rp23,511,112,848.00 dan Rp21,887,414,035.00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.34 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Beban Barang		
1	Beban Barang Pakai Habis	9,457,309,513.00	10.764.125.306,00
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
B	Beban Jasa		
1	Beban Jasa Kantor	5,049,576,744.00	4.685.761.577,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2,820,000.00	2.808.000,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	32,140,000.00	7.497.500,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	791,321,700.00	729.952.000,00
5	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	808,916,000.00	1.510.000.000,00
C	Beban Pemeliharaan	179,751,500.00	101.165.000,00
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179,751,500.00	101.165.000,00
D	Beban Perjalanan Dinas	7,189,277,391.00	4.086.104.652,00
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,189,277,391.00	4.086.104.652,00
	Jumlah	23,511,112,848.00	21,887,414,035.00

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp23,475,137,321.00, Sedangkan Realisasi Beban

Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp23,511,112,848.00.

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Pelaksanaan Reses di tahun 2024 sebanyak 2 kali sedangkan tahun 2023 3 kali
 - b. Perjalanan dinas DPRD di tahun 2024 lumsum sedangkan tahun 2023 rill cost
 - c. Kegiatan pelantikan DPRD periode 2024 s/d 2029
 - d. DPRD Tidak menggunakan anggaran untuk medical check up
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp35,975,527.00 (Rp23,511,112,848.00 - Rp23,475,137,321.00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.35 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	35,975,527.00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Beban LO:	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	35,318,880.00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
c	Penggunaan Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	1,791,349.00
d	Penggunaan Persediaan Barang Yang Bersumber dari Hibah	0,00
e	Reklas dari Aset Tetap-Brg Pakai Habis dan Reklas dari asset Tetap- <i>Extracomtable</i>	0,00
3	Pengurangan Beban LO:	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	49,880.00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
c	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	1,084,822.00
d	Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Ke Aset Tetap	0,00
e	Reklas Persediaan Kadalursa	0,00
	Jumlah Penjelasan Selisih	35,975,527.00

5.4.2.1.3 Beban Bunga - LO

Beban Bunga untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.2.1.4 Beban Subsidi

Beban Subsidi untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp 0,00 dan Rp0,00.

5.4.2.1.5 Beban Hibah - LO

Beban Hibah untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial (Bansos) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

Berikut Rincian Beban penyisihan piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp 879,176,913.14 dan Rp910,573,838.85. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.36 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	796,417,167.14	830.322.629,85
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	71,177,096.00	68.668.559,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	11,582,650.00	11.582.650,00
Jumlah	879,176,913.14	910,573,838.85

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya Aset tahun 2023 nilai Buku Rp 0.00 di tahun 2024
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK.

5.4.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.3 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp (53,089,098,372.14) dan Rp(51,664,435,930.85) terdiri dari:

Tabel 5.37 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan-LO	0,00	0,00
2	Beban-LO	53,089,098,372.14	51,664,435,930.85
	Surplus/(Defisit) Operasional	(53,089,098,372.14)	(51,664,435,930.85)

5.4.4 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional menghasilkan Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional yang terdiri dari:

5.4.4.1 Surplus Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2024 dan 2023.

5.4.4.2 Defisit Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023

5.4.5 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah.

5.4.6. SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.38 Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO	0,00	0,00
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
✓ Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	0,00	0,00
➤ Beban Operasional	53,089,098,372.14	51,664,435,930.85
✓ Beban Operasional	53,089,098,372.14	51,664,435,930.85
➤ Beban Transfer	0,00	0,00
✓ Beban Transfer	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	(53,089,098,372.14)	(51,664,435,930.85)
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	-
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
➤ Defisit Non-Operasional	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Non Operasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	(53,089,098,372.14)	(51,664,435,930.85)

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.39 Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	8,789,891,200.14	8,665,532,319.99

Sekretariat DPRD menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 dan 2022 pada Sekretariat DPRD yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.40 Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(53,089,098,372.14)	(51,664,435,930.85)
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional		
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa		
Surplus/(Defisit) – LO	(53,089,098,372.14)	(51,664,435,930.85)

Pada Tahun 2024 dan 2023 Sekretariat DPRD masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.6*.

5.6.3. R/K PPKD (Khusus untuk SKPD)

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing senilai Rp 53,039,844,057.00 dan Rp 51,788,794,811.00.

5.6.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.41 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas – Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Lain-Lain	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Kas	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Investasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-Lain - Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-Lain – Kewajiban	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024 harus dilakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

5.6.4.1. Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan

Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.6.4.2 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20NN dan 20N-1 masing-masing senilai Rp0,00 sebagai kurang saji dan senilai Rp0,00 sebagai kurang saji.

5.6.4.3. Koreksi Ekuitas – Lain-lain

Koreksi Ekuitas Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 202N senilai total RpXX sebagai lebih saji.

a. Koreksi Ekuitas Lain-Lain Kas

Koreksi Ekuitas Kas di Kas Daerah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai RpXX dan Rp0,00.

b. Koreksi Ekuitas Lain-Lain Piutang Pajak

Koreksi Ekuitas piutang Pajak untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

c. Koreksi Ekuitas Lain-Lain Piutang Retribusi

Koreksi Ekuitas Piutang Retribusi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai total Rp,00 sebagai lebih saji dan senilai Rp,00 sebagai kurang saji pada tahun 20XX

d. Koreksi Ekuitas Lain-lain (Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan)

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan piutang deviden pada beberapa BUMD. Koreksi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 sebagai kurang saji tahun 20XX

e. Koreksi Ekuitas Lain-Lain (Piutang Lain-lain PAD yang Sah)

Koreksi Ekuitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 .

f. Koreksi Ekuitas Lain-lain – Investasi

Koreksi Ekuitas - Investasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 sebagai lebih saji. Koreksi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX

g. Koreksi Ekuitas Lain-Lain - Aset Lainnya

Koreksi Ekuitas Aset Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

h. Koreksi Ekuitas Lain-lain - Kewajiban

Koreksi Ekuitas Kewajiban untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp0,00

5.6.5. Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Sekretariat DPRD Per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.42 Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Ekuitas Akhir	8,740,636,885.00	8,789,891,200.14

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point 5.3.3*

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum OPD

6.1.1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

- a. Kedudukan
 1. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
 2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

6.1.2. Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur Organisasi

- a. Susunan Organisasi
 1. Sekretaris Dewan.
 2. Bagian, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional:
 - Perisalah Legislatif Ahli Muda

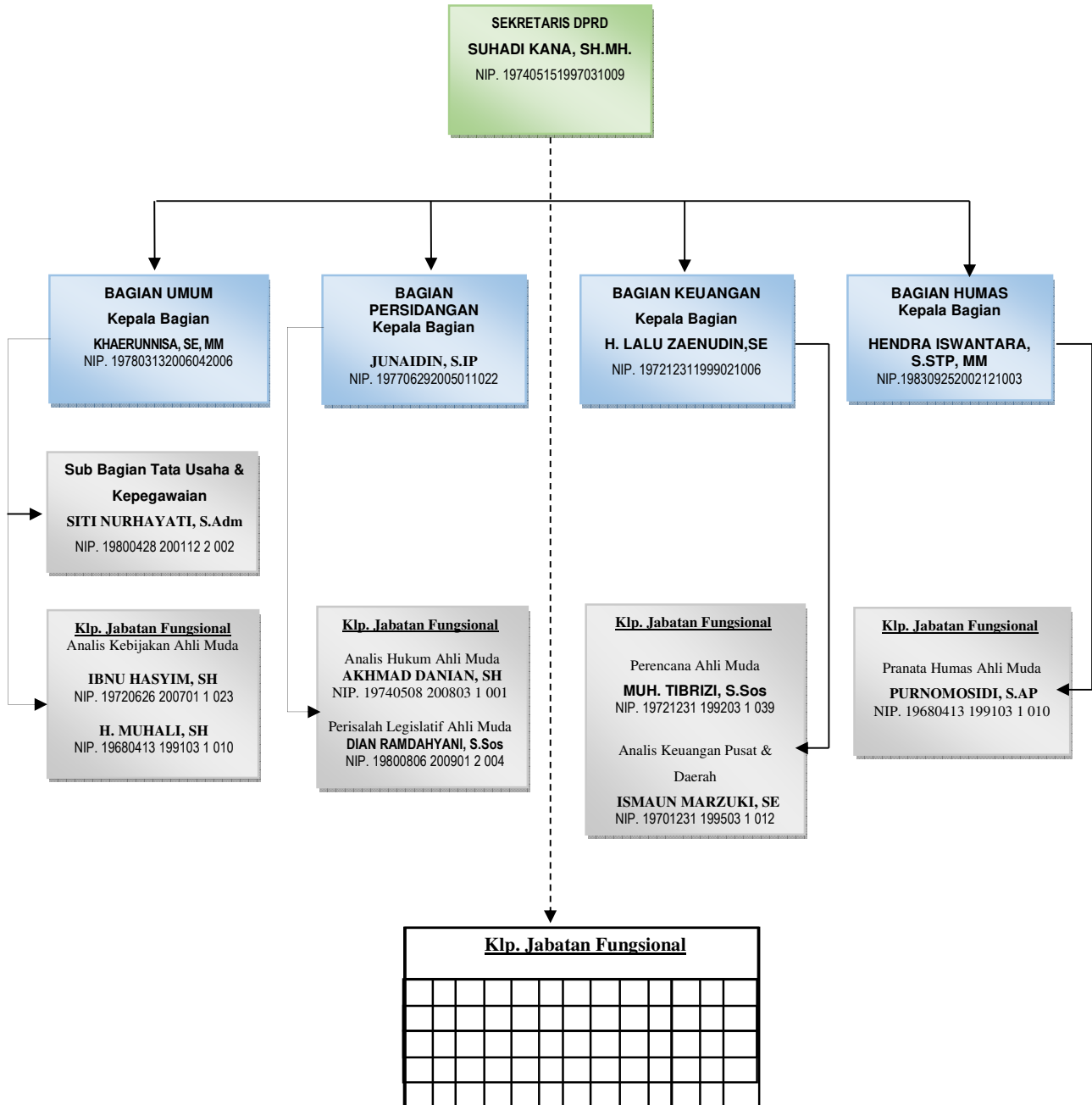
- Analis Hukum Ahli Muda
 - c. Bagian Keuangan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional:
 - Perencana Ahli Muda
 - d. Bagian Humas dan Protokol
 1. Kelompok Jabatan Fungsional:
 - Pranata Humas Ahli Muda
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi
1. Sekretaris Dewan
 - (1) Sekretaris Dewan mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan kegiatan kesekretariatan DPRD.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dewan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja sekretariat DPRD;
 - b. perumusan Kebijakan Teknis dibidang kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran (RKA-DPA) dan Penetapan Kinerja sekretariat DPRD;
 - d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas sekretariat DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait;
 - f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas sekretariat DPRD dengan Sekretaris Daerah;
 - g. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, dan atau swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

- i. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup sekretariat DPRD;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat DPRD;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan DPRD;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lombok Tengah

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah
 Nomor : 70 Tahun 2021
 Tanggal : 01 Desember 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



6.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

Jumlah Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2024 adalah sebanyak 43 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel register pegawai berikut :

Tabel 6.2. REGISTER PEGAWAI
Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah
Keadaan : 31 Desember 2024

N O	NAMA	L / P	Gol	Eselon	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SUHADI KANA, S.Sos, MH	L	IV/c	II/b	SEKRETARIS DPRD	S.2	DIKLAT PIM -III	2008
2	H. LALU ZAENUDIN,SE	P	IV/b	III/a	KABAG. KEUANGAN	S.1	DIKLAT PIM -II	
3	HENDRA SISWANTARA, S.TP.MM	L	IV/b	III/a	KABAG HUMAS DAN PROTOKOL	S.2	-	
4	Hj.KHAIRUNNISA, SE.MM	P	IV/a	III/a	KABAG. UMUM	S.2	-	
5	JUNAIDIN, S.IP	L	IV/a	III/a	KABAG PERSIDANGAN DAN PER – UU	S.1	DIKLAT PIM -IV	2019
6	H.MUHALI,SH	L	III/d	-	FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	S.1	DIKLAT PIM -IV	2005
7	PURNOMOSIDI, S. AP	L	III/d	-	FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	S.1	-	
8	MUH.TIBRIZI, S.Sos	L	III/d	-	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA	S.1	-	
9	H.ISMAUN MARZUKI,SE	L	III/d	-	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA	S.1	DIKLAT PIM -IV	2018
10	IBNU HASYIM, SH.	L	III/d	-	FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	S.1	-	
11	AHMAD DANIAN, SH	L	III/d	-	FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI MUDA	S.1	-	
12	SITI NURHAYATI, S.Adm	P	III/d	IV/a	KASUBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	S.1	-	
13	DIAN RAMDAYANI, Sos	P	III/d	-	FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA	S.1	-	
14	LALU SUPARMAN, S. ST.	L	III/c	-	PENGELOLA SURAT	S.1	-	

N O	NAMA	L / P	Gol	Eselon	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
15	MAROJAL BAHRAIN	L	III/b	-	AJUDAN KETUA	SLTA	-	
16	BAIQ SULFA ERNAWATI, S. AP.	P	III/b	-	BENDAHARA	S.1	-	
17	HENDRY FEBRIANDY, SE	L	III/b	-	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	S.1	-	
18	BAIQ ERNI SULISTIA PUTRI	P	III/b	-	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SLTA	-	
19	LALU MUHAMMAD SYUKRON, S. IP	L	III/b	-	PENGELOLA KEUANGAN	S.1	-	
20	ABDURRAHMAN, S. IP	L	III/b	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
21	MUHAMAD SADERI, S.Adm	L	III/b	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
22	MUSTIKA JULIANDI, S.Adm	L	III/b	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
23	BAIQ YULIANA	P	III/b	-	PETUGAS KEPROTOKOLAN	SLTA	-	
24	FARIDAN DANI, S.Adm	L	III/a	-	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	S.1	-	
25	GHAZI MUQAFFI, SM	L	III/a	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
26	DESI PURNAMASARI, SM	P	III/a	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
27	SRI SURYANI, SM	P	III/a	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
28	LAILI HAERULLISAN, SE	P	III/a	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
29	WADI'AH	P	III/a	-	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA	-	
30	MARIATI	P	III/a	-	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA	-	
31	BAIQ JAHRAWATI	P	III/a	-	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	SLTA	-	
32	IRWAN ROYADI	L	III/a	-	PRANATA KEARSIPAN	SLTA	-	
33	AHMAD	L	III/a	-	PENGEMUDI	SLTA	-	
34	MARINAH	P	III/a	-	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA	-	
35	LALU ALPIAN WIJAYA	L	III/a	-	SOPIR KETUA	SLTA	-	
36	MASKANAH	P	II/d	-	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	SLTA	-	
37	EKA SASMITA	L	II/d	-	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	SLTA	-	

N O	NAMA	L/ P	Gol	Eselon	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
38	BAIQ HIKMAYA DIANA	P	II/d	-	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SLTA	-	
39	MUHAMAD HENDRA HIDAYAT	L	II/d	-	TENAGA PELIPUTAN	SLTA	-	
40	ZAENAL ARIFIN	L	II/d	-	PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER	SLTA	-	
41	ROYAHIN	P	II/d	-	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA	-	
42	FAUZI ARDIANSYAH, A. Md	L	II/d	-	PENGELOLA AKUNTANSI	D-III	-	
43	ERVI PRASTIKA, A.Md	P	II/d	-	PENGOLAH DATA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN	D-III	-	
44	FASLIHUL ARSYI, A.Md.Ak.	L	II/d	-	PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM ANGGARAN	D-III	-	
45	LALU RAMDAN ARIF	L	II/c	-	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SLTA	-	

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Praya, 20 Januari 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Lombok Tengah



SUHADI KANA, S.Sos, MH
NIP. 197405151997031009



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

SEKRETARIAT DPRD
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

**SEKRETARIAT DPRD
JURNAL PENYESUAIAN
PER 31 DESEMBER 2024**

No	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
1	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	49,880.00	-
	2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		-
	2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		-
	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	-	49,880.00
	8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	-	
	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang Barang dan Jasa Th 2023 di Tahun 2024		
2	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	49,880.00	
	8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	35,269,000.00	
	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		49,880.00
	2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		35,269,000.00
	2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang Barang dan Jasa Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
3	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	106,622,003.00	-
	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	106,622,003.00
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang TPP Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024		
4	2.1.06.01.02.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	98,062,015.00	
	8.1.01.02.01.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		98,062,015.00
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang TPP Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
5	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	942,200.00	
	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	87,168.00	
	8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS		
	8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		
	8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	290.00	
	2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS		942,200.00
	2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS		87,168.00
	2.1.06.01.01.0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS		
	2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS		
	2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS		290.00
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang gaji dan tunjangan pegawai Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
6	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	445,465.00	-
	1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	214,730.00	-
	1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	424,627.00	
	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		445,465.00
	8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		214,730.00
	8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		424,627.00



SEKRETARIAT DPRD

Jl. Raya Praya - Kopang - Jontlak No.- Telp./Fax. (0370) 655075

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

No	Nama	Jabatan
1	H. Lalu Herdan	Pemb. Penanggung jawab
2	Widawan	Pengendali Teknis
3	Sri Sapti Hamdaningsih	Ketua Tim
4	Salman	Anggota
5	Ria Dwi Purwanty	Anggota

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai per tanggal 31 Desember 2024 kepada :

Nama Lengkap : Eka Sasmita
Jabatan : Bendahara Barang pada Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah barang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Kertas HVS, 60 Gram	1	Rim	40.720,-	40.720,-
2.	Kertas HVS Kwarto, 60 Gram	1	Rim	34.950,-	34.950,-
3.	Kertas Bufalo, ukuran Standar	1	Pak	58.180,-	58.180,-
4.	Kertas Plastik ukuran Standar	1	Pak	40.450,-	40.450,-
5.	Karbon, Merk Daito isi 100lbr	1	Pak	52.360,-	52.360,-
6.	Klip	1	Kotak	2.550,-	2.550,-
7.	Lampu LED 14 Watt	1	buah	47.682,-	47.682,-
8.	Lampu LED 8 Watt	2	Buah	41.238,-	95.364,-
9.	Kabel NYA 1 ½ mm	1	roll	193.305,-	193.305,-
10.	Batu Baterai ABC besar	2	buah	9.021,-	18.042,-
11.	Batu baterai ABC sedang	3	Buah	3.866,-	11.598,-
12.	Batu Baterai A2	1	buah	9.665,-	9.665,-

14.	Pembersih lantai	1	buah	30.000,-	30.000,-
15.	Pengharum Ruangan Semprot	1	buah	50.000,-	50.000,-
16.	Pengharum Ruangan gantung	1	buah	9.750	9.750,-
17.	Sabun cuci piring	1	buah	19.080	19.080,-
18.	Sapu	1	buah	35.000,-	35.000,-
19.	Semprot Nyamuk	1	buah	50.000,-	50.000,-
20.	Tisu Kotak	1	kotak	10.900,-	10.900,-
21.	Keset	1	buah	10.000,-	10.000,-
22.	Lak Ban, ukuran sedang	3	buah	12.180,-	36.540,-
23.	Map Snelecter, isi 100	1	buah	17.450,-	17.450,-
24.	Map PlastikLubang	1	buah	5.720,-	5.720,-
25.	Map orderner	1	buah	23.270,-	23.270,-
26.	Bollpoint Pilot BPTP	2	buah	3.690,-	7.380,-
27.	Spidol Permanen snowman	1	buah	7.270,-	7.270,-
28.	Spidol Snowman	1	buah	6.520,-	6.520,-
29.	Tinta Printer Hitam	1	botol	29.545,-	29.545,-
30.	Tinta Printer warna	1	botol	27.090,-	27.090,-
31.	Steples Merk MAX, uk 24	1	buah	38.200,-	38.200,-
32.	Steples Merk MAX, uk 10	1	buah	17.450,-	17.450,-
Jumlah					1.084.822,-

Bendahara Barang



EKA SASMITA
NIP. 198408012009011004

Praya, 31 Desember 2024
Yang memeriksa/
Pengguna Anggaran,



SUHADLKANA, S.Sos.MH
NIP.197405151997031009



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : **SUHADI KANA, S.Sos, MH.**
 NIP. : **19740515 199703 1 009**
 Jabatan : **Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah selaku Pengguna Anggaran**

Sebagai atasan langsung Bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat DPRD, telah melakukan pemeriksaan setempat kepada :


Nama Lengkap : **Baiq Sulfa Ernawati, S.AP.**
 NIP. : **19750927 200701 2 104**
 Jabatan : **Bendahara Pengeluaran**

Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah tanggal 2 Januari No. : 1 Tahun 2024 yang ditugaskan mengurus uang APBD Kab. Lombok Tengah Tahun 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan kas Per 31 Desember 2024 dan bukti – bukti yang ada dalam kepengurusan ini, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas Bank, Uang recehan	Rp.	0,00
b. Tagihan pajak yang belum disetor	Rp.	0,00
c. Saldo Bank	Rp.	0,00
d. Tanda bukti pengeluaran yg belum di SPJkan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Total	Rp.	0,00
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Register dan lain	Rp.	0,00
Perbedaan Positif antara Saldo Buku dan saldo kas	Rp.	0,00

Sebab-sebab : -

Bendahara Pengeluaran


BAIQ SULFA ERNAWATI, S.AP.
 NIP. 197509272007012104

Yang melakukan Pemeriksaan
 Sekretaris DPRD
 Kabupaten Lombok Tengah
 selaku Pengguna Anggaran


SUHADI KANA, S.Sos, MH.
 NIP. 197405151997031009

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Desember 2024
 Nama Penutup Kas : SUHADI KANA, S.Sos, MH
 Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : -

Jumlah transaksi s.d bulan : DESEMBER 2024
 - Jumlah Penerimaan mulai dari 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 :
 Anggaran DPRD Rp. 23.990.407.930,00
 Anggaran Sekretariat DPRD Rp. 35.422.845.766,00
 Jumlah : Rp. 59.413.253.696,00

- Jumlah Pengeluaran mulai dari 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 :
 Anggaran DPRD Rp. 23.990.407.930,00
 Anggaran Sekretariat DPRD Rp. 35.422.845.766,00
 Jumlah : Rp. 59.413.253.696,00


Saldo buku.....: Rp. 0,00
 Saldo Kas: Rp. 0,00
 Saldo Bank: Rp. 0,00

Terdiri dari :

1. Uang Kertas :						
Pecahan	Rp. 100.000,-	0	Lembar	=	Rp. 0,00	
Pecahan	Rp. 50.000,-	0	Lembar	=	Rp. 0,00	
Pecahan	Rp. 20.000,-	0	Lembar	=	Rp. 0,00	
Pecahan	Rp. 10.000,-	0	Lembar	=	Rp. 0,00	
Pecahan	Rp. 5.000,-	0	Lembar	=	Rp. 0,00	
Pecahan	Rp. 2.000,-	0	Lembar	=	Rp. 0,00	
Pecahan	Rp. 1.000,-	0	Lembar	=	Rp. 0,00	
2. Uang Logam						
Pecahan	Rp. 1.000,-	0	Keping	=	Rp. 0,00	
Pecahan	Rp. 500,-	0	Keping	=	Rp. 0,00	
Pecahan	Rp. 100,-	0	Keping	=	Rp. 0,00	
Pecahan	Rp. 50,-	0	Keping	=	Rp. 0,00	
Pecahan	Rp. 25,-	0	Keping	=	Rp. 0,00	
3. Saldo bank						
4. Tagihan pajak yang belum disetor pada Bendahara Pengeluaran Pembantu						
5. Tanda bukti pengeluaran yang belum di SPjkan						
Jumlah				Rp.	=	Rp. 0,00

Perbedaan positif : Rp. -
 Sebab-sebab perbedaan : -

Bendahara Pengeluaran


BAIQ SULFA ARNAWATI, S.AP
 NIP. 197509272007012104

Yang melakukan Pemeriksaan
 Sekretaris DPRD
 Kabupaten Lombok Tengah
 Selaku Pengguna Anggaran


SUHADI KANA, S.Sos, MH
 NIP. 197405151997031009

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2024
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2024

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP. 197503022000032006

Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
Sekretaris DPRD Kab. Lombok Tengah



SUHADI KANA, S.Sos, MH
NIP. 197405151997031009

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	Belanja Pegawai	28,706,338,941.00	28,706,338,941.00	0,00	0,00	0,00	28,706,338,941.00
2	Belanja Barang Jasa	23,475,137,321.00	23,475,137,321.00	0,00	0,00	0,00	23,475,137,321.00
3	Belanja Modal	858,367,795.00	858,367,795.00	0,00	0,00	0,00	858,367,795.00
	Jumlah	53,039,844,057.00	53,039,844,057.00	0,00	0,00	0,00	53,039,844,057.00

Praya, 20 Januari 2025

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP. 197503022000032006

a.n. Sekretaris DPRD Kab. Lombok Tengah
Kepala Bagian Keuangan



H. LALU MOHAMAD ZAENUDIN, SE
NIP. 197212311999021006

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos Neraca	NERACA Menurut		Selisih 5 = 3-4	Koreksi Selisih +/-		NERACA Rekonsiliasi 8 = 4+7
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	ASET LANCAR	1,084,822.00	1,084,822.00	0.00	0.00	0.00	1,084,822.00
	Persediaan	1,084,822.00	1,084,822.00	0.00	0.00	0.00	1,084,822.00
2	ASET TETAP	8,803,961,850.00	8,803,961,850.00	0.00	0.00	0.00	8,803,961,850.00
	Tanah	3,899,850,000.00	3,899,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,899,850,000.00
	Peralatan dan Mesin	9,200,382,480.44	9,200,382,480.44	0.00	0.00	0.00	9,200,382,480.44
	Gedung dan Bangunan	3,862,769,956.00	3,862,769,956.00	0.00	0.00	0.00	3,862,769,956.00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	410,513,000.00	410,513,000.00	0.00	0.00	0.00	410,513,000.00
	Aset Tetap Lainnya	120,907,608.00	120,907,608.00	0.00	0.00	0.00	120,907,608.00
	Akumulasi Penyusutan	(8,690,461,194.44)	(8,690,461,194.44)	0.00	0.00	0.00	(8,690,461,194.44)
3	ASET LAINNYA	70,000,766.00	70,000,766.00	0.00	0.00	0.00	70,000,766.00
	Jumlah	8,875,047,438.00	8,875,047,438.00	0.00	0.00	0.00	8,875,047,438.00
4	KEWAJIBAN	134,410,553.00	134,410,553.00	0.00	0.00	0.00	134,410,553.00
	Utang Belanja Pegawai	99,091,673.00	99,091,673.00	0.00	0.00	0.00	99,091,673.00
	Utang Barang Jasa	35,318,880.00	35,318,880.00	0.00	0.00	0.00	35,318,880.00
5	EKUITAS	8,740,636,885.00	8,740,636,885.00	0.00	0.00	0.00	8,740,636,885.00
	Jumlah	8,875,047,438.00	8,875,047,438.00	0.00	0.00	0.00	8,875,047,438.00

Praya, 20 Januari 2025

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP. 197503022000032006

a.n. Sekretaris DPRD Kab. Lombok Tengah
Kepala Bagian Keuangan


H. LALU MOHAMAD ZAENUDIN, SE
NIP. 197212311999021006

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LO	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-)		LO Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	Beban Pegawai	28,698,808,611.00	28,698,808,611.00	0.00	0.00	0.00	28,698,808,611.00
2	Beban Barang dan Jasa	23,511,112,848.00	23,511,112,848.00	0.00	0.00	0.00	23,511,112,848.00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	879,176,913.14	879,176,913.14	0.00	0.00	0.00	879,176,913.14
	Jumlah	53,089,098,372.14	53,089,098,372.14	0.00	0.00	0.00	53,089,098,372.14

Praya, 20 Januari 2025

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP. 197503022000032006

a.n. Sekretaris DPRD Kab. Lombok Tengah
Kepala Bagian Keuangan



H. LALU MOHAMAD ZAENUDIN, SE
NIP. 197212311999021006

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LPE	LPE Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LPE Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	EKUITAS AWAL	8,789,891,200.14	8,789,891,200.14	0.00	0.00	0.00	8,789,891,200.14
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(53,089,098,372.14)	(53,089,098,372.14)	0.00	0.00	0.00	(53,089,098,372.14)
3	RK PPKD	53,039,844,057.00	53,039,844,057.00	0.00	0.00	0.00	53,039,844,057.00
4	EKUITAS AKHIR	8,740,636,885.00	8,740,636,885.00	0.00	0.00	0.00	8,740,636,885.00

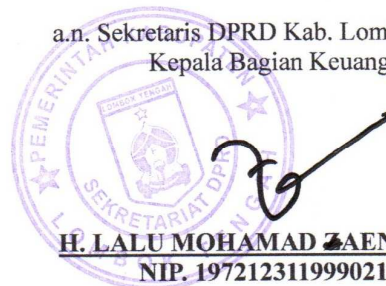
Praya, 20 Januari 2025

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP. 197503022000032006

a.n. Sekretaris DPRD Kab. Lombok Tengah
Kepala Bagian Keuangan



H. LALU MOHAMAD ZAENUDIN, SE
NIP. 197212311999021006

SEKRETARIAT DPRD
DAFTAR UTANG
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	942,200.00
2	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	87,168.00
3	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	290.00
4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	98,062,015.00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	49,880.00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	35,269,000.00
	Jumlah	134,410,553.00

KERTAS KERJA BEBAN OPERASIONAL-LO
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Periode 31 Desember 2024

	URAIAN	LRA 2024	MUTASI TAMBAH/DEBET		MUTASI KURANG/KREDIT		BEBAN LO 2024
			Pemakaian Persediaan Tahun Sebelumnya di tahun berkenaan	Utang 2024	Pembayaran Utang 2023	Persediaan Akhir Per 31 Desember 2024	
8.1.01	Beban Pegawai	28,706,338,941.00	-	99,091,673.00	106,622,003.00	-	28,698,808,611.00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3,287,037,484.00	-	1,029,658.00	-	-	3,288,067,142.00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2,492,240,490.00		942,200.00			2,493,182,690.00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok P3K						-
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	259,778,624.00		87,168.00			259,865,792.00
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga P3K						-
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	115,110,000.00					115,110,000.00
8.1.01.01.03.0002	Beban Tunjangan Jabatan P3K						-
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	183,658,000.00					183,658,000.00
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional P3K						-
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	86,105,000.00					86,105,000.00
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum P3K						-
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	145,998,720.00					145,998,720.00
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras P3K						-
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4,110,155.00					4,110,155.00
8.1.01.01.07.0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus P3K						-
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	36,495.00		290.00			36,785.00
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji P3K						-
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1,408,985,527.00	-	98,062,015.00	106,622,003.00	-	1,400,425,539.00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,408,985,527.00		98,062,015.00	106,622,003.00		1,400,425,539.00
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS						-
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19,908,000.00	-	-			19,908,000.00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19,908,000.00					19,908,000.00
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23,759,407,930.00	-	-			23,759,407,930.00
8.1.01.04.01.0001	Beban Uang Representasi DPRD	1,112,580,000.00					1,112,580,000.00
8.1.01.04.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	119,443,800.00					119,443,800.00
8.1.01.04.03.0001	Beban Tunjangan Beras DPRD	140,494,800.00					140,494,800.00
8.1.01.04.04.0001	Beban Uang Paket DPRD	95,340,000.00					95,340,000.00
8.1.01.04.05.0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1,613,241,000.00					1,613,241,000.00
8.1.01.04.07.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	120,155,700.00					120,155,700.00
8.1.01.04.08.0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6,300,000,000.00					6,300,000,000.00

	URAIAN	LRA 2024	MUTASI TAMBAH/DEBET		MUTASI KURANG/KREDIT		BEBAN LO 2024
			Pemakaian Persediaan Tahun Sebelumnya di tahun berkenaan	Utang 2024	Pembayaran Utang 2023	Persediaan Akhir Per 31 Desember 2024	
8.1.01.04.09.0001	Beban Tunjangan Reses DPRD	1,039,500,000.00					1,039,500,000.00
8.1.01.04.10.0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	227,728,004.00					227,728,004.00
8.1.01.04.12.0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	24,381,986.00					24,381,986.00
8.1.01.04.12.0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2,288,160.00					2,288,160.00
8.1.01.04.12.0003	Beban Jaminan Kematian DPRD	6,864,480.00					6,864,480.00
8.1.01.04.12.0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	5,602,000,000.00					5,602,000,000.00
8.1.01.04.13.0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6,912,500,000.00					6,912,500,000.00
8.1.01.04.14.0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	442,890,000.00					442,890,000.00
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-			-
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	231,000,000.00	-	-			231,000,000.00
8.1.01.06.01.0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	231,000,000.00					231,000,000.00
8.1.01.06.02.0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH						-
8.1.01.88	Beban Pegawai BOS	-	-	-			-
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	-	-	-			-
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	23,475,137,321.00	1,791,349.00	35,318,880.00	-	1,134,702.00	23,511,112,848.00
8.1.02.01	Beban Barang	9,456,602,986.00	1,791,349.00	-	-	1,084,822.00	9,457,309,513.00
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	91,550,000.00					91,550,000.00
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia						-
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	155,623,850.00					155,623,850.00
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku						-
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman						-
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	792,000.00					792,000.00
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan						-
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	488,254,000.00					488,254,000.00
8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	14,322,000.00					14,322,000.00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84,105,811.00	997,485.00			445,465.00	84,657,831.00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17,814,033.00					17,814,033.00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	461,024,148.00					461,024,148.00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,450,000.00					1,450,000.00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18,287,644.00					18,287,644.00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	134,490,000.00	264,210.00			214,730.00	134,539,480.00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	59,892,000.00	529,654.00			424,627.00	59,997,027.00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1,264,500.00					1,264,500.00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	129,299,500.00					129,299,500.00

	URAIAN	LRA 2024	MUTASI TAMBAH/DEBET		MUTASI KURANG/KREDIT		BEBAN LO 2024
			Pemakaian Persediaan Tahun Sebelumnya di tahun berkenaan	Utang 2024	Pembayaran Utang 2023	Persediaan Akhir Per 31 Desember 2024	
	TOTAL BEBAN OPERASIONAL 2024	52,181,476,262.00	1,791,349.00	134,410,553.00	106,622,003.00	1,134,702.00	52,209,921,459.00